

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Luas wilayah Indonesia adalah 205.308.388 km² yang terdiri dari 34 provinsi, 403 kabupaten, 98 kota, dan jumlah penduduk sebesar 259.480.000 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang besar akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pemerintah mengingat masyarakat merupakan salah satu penyumbang dana pajak yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah. Masyarakat pun semakin sadar akan pentingnya transparansi dari pemerintah mengenai informasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari masyarakat khususnya oleh pemerintah daerah.

Salah satu persoalan yang memicu adanya transparansi informasi keuangan oleh pemerintah daerah yaitu permasalahan korupsi yang kian marak dan menjadi tren di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya krisis kepercayaan dari masyarakat ke pemerintah daerah. Menurut indeks persepsi korupsi Indonesia versi *Transparency International* (TI) Indonesia berada pada angka 2,8 dengan rangking 110 dari 180 negara terkorup pada tahun 2010. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan sekitar 1.800 rekening bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah milik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat 9 kasus korupsi yang melibatkan gubernur yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terdapat satu gubernur harus berurusan dengan KPK. Kasus kejahatan korupsi yang

melibatkan walikota/bupati dan wakil bupati terdapat 34 kasus dan pada tahun 2013 setidaknya terdapat dua kepala daerah harus menjalani proses hukuman. (<http://news.liputan6.com>, Desember, 2013).

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana, salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media internet.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 menjelaskan tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dimana SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Ini menunjukkan bahwa adanya tuntutan pemerintah daerah dalam mempublikasikan kinerjanya kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun non elektronik. Penyampaian informasi melalui media elektronik salah satunya adalah menggunakan internet.

Pelaporan keuangan di internet sudah banyak dipraktikan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Hal yang baik ini telah diikuti oleh pemerintah daerah dimana telah tersedia *website* pemerintah daerah sebagai media pelaporan informasi keuangan maupun non keuangan. Namun fakta di

lapangan menunjukkan tidak semua pemerintah daerah bersedia untuk melaporkan informasi keuangannya di *website*-nya masing-masing.

Penelitian terkait dengan pelaporan keuangan di internet belum banyak dilakukan di pemerintahan dibandingkan perusahaan, disebabkan karena terbatasnya informasi pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Sedangkan di perusahaan, informasi keuangan dapat dengan mudah didapat. Contohnya saja Bursa Efek Indonesia telah menyediakan secara lengkap informasi keuangan perusahaan yang dapat diperoleh dengan mudah oleh setiap pemohon informasi.

Penelitian tentang pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun faktor-faktor yang telah diteliti tidak selalu menunjukkan hasil yang sama antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah yang diteliti oleh Medina (2012) dimana hasil menunjukkan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Sedangkan oleh Sinaga (2011), Ratmono (2013), Rahman (2013), dan Laswad (2005) menunjukkan tidak berpengaruh.

Penelitian tentang pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah yang diteliti oleh Laswad *et al* (2005) dimana hasil menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah,

sedangkan oleh Sinaga (2011) dan Medina (2012) menunjukkan tidak berpengaruh.

Penelitian tentang pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah yang diteliti oleh Rahman (2013) dan Laswad *et al* (2005) menunjukkan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, sedangkan oleh Sinaga (2011), Afryansyah (2013), dan Ratmono (2013) menunjukkan tidak berpengaruh.

Penelitian tentang pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah yang diteliti oleh Medina (2012), dan Laswad *et al* (2005), hasil menunjukkan tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah, sedangkan oleh Rahman (2013) menunjukkan tidak berpengaruh.

Penelitian tentang opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah yang diteliti oleh Ratmono (2013), hasil menunjukkan opini BPK tidak berpengaruh terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahman (2013) dimana variabel independen yang dipilih yaitu ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan menambahkan variabel independen yaitu opini BPK serta menghapus variabel

kompetisi politik. Variabel yang dipilih merupakan variabel yang sering digunakan oleh peneliti sebelumnya namun hasil yang diperoleh belum konsisten.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahman yaitu tidak adanya variabel kompetisi politik dikarenakan logika yang masih lemah atau kurang kuat sehingga akan lebih baik jika variabel kompetisi politik tidak digunakan. Adanya penambahan variabel opini BPK dikarenakan adanya akuntabilitas pemerintah daerah yang diwujudkan dengan transparansi laporan keuangan, maka dibutuhkan pihak ketiga yang menjamin kelayakan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pihak ketiga tersebut yaitu BPK yang bertugas mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahman juga terdapat pada pengukuran variabel dan periode pelaporan keuangan. Pada penelitian Rahman, variabel ukuran pemerintah daerah diukur dengan total asset, variabel kekayaan pemerintah daerah diukur dengan perbandingan total PAD terhadap belanja daerah, dan variabel pengungkapan pelaporan keuangan di internet diukur dengan *dummy*, sedangkan pada penelitian ini, variabel ukuran pemerintah daerah diukur dengan jumlah penduduk, variabel kekayaan pemerintah daerah diukur dengan total asset, dan variabel pengungkapan pelaporan keuangan di internet diukur dengan *scoring*. Pada penelitian Rahman, periode pelaporan keuangan yang digunakan yaitu periode 2010 sedangkan pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2012.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Pelaporan Keuangan di Internet oleh Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia)**”.

B. Batasan Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah memiliki alamat *website* pemerintah daerah dan dapat diakses. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah pada penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan opini BPK.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
3. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif pengungkapan terhadap pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?

4. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?
5. Apakah opini BPK berpengaruh positif terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh opini BPK terhadap pengungkapan pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi referensi terhadap kebijakan pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangannya melalui internet, sehingga terbentuk transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini semakin menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya transparansi informasi keuangan dari pemerintah daerah sehingga masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta menambah pengetahuan sektor publik khususnya tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.